

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis lakukan, riset ini memuat tiga kesimpulan sebagai berikut,

Pertama, pemberitaan mengenai kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi dalam framing Kantor Berita ANTARA tidak merepresentasikan realitas kebijakan secara tunggal, melainkan menghadirkan konstruksi realitas yang beragam. ANTARA menampilkan kebijakan tersebut dalam dua kecenderungan utama, yaitu sebagai solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja melalui pembinaan disiplin dan pembentukan karakter, serta sebagai kebijakan yang memunculkan berbagai pertanyaan kritis terkait perlindungan anak, efektivitas pendekatan militeristik, dan kesiapan regulasi pendidikan. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa pemberitaan media berperan sebagai ruang diskursif yang mempertemukan berbagai kepentingan, perspektif, dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kedua, berdasarkan analisis framing, ditemukan bahwa konstruksi pemberitaan dalam media mencerminkan dinamika kontestasi makna antara aktor pendukung dan pengkritik kebijakan. Aktor pemerintah dan sebagian pihak pendukung cenderung membingkai kebijakan barak militer sebagai upaya pembinaan disiplin, penguatan karakter kebangsaan, serta solusi terhadap meningkatnya kenakalan remaja. Sebaliknya, lembaga perlindungan anak, akademisi, dan sebagian pejabat publik menghadirkan framing kritis yang menyoroti potensi risiko terhadap hak anak, belum jelasnya standar operasional program, serta perlunya pendekatan pendidikan yang

lebih humanistik. Kontestasi ini memperlihatkan bahwa realitas kebijakan publik dibentuk melalui proses negosiasi makna di ruang publik yang dimediasi oleh media massa.

Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan ANTARA mengenai program pendidikan di barak militer tidak hanya berisi penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memuat konstruksi nilai dan moral tertentu yang secara tidak langsung membentuk cara masyarakat memahami program tersebut. Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat dua kelompok nilai moral dominan yang muncul dalam pemberitaan ANTARA. Kelompok berita yang mendukung program pendidikan barak militer lebih banyak menonjolkan nilai disiplin, nasionalisme, tanggung jawab, pembentukan karakter, dan pembangunan bangsa. Sebaliknya, kelompok berita yang menampilkan sudut pandang kritis atau kontra lebih menekankan nilai perlindungan anak, hak asasi manusia, pendekatan pedagogis yang humanistik, serta pentingnya dukungan psikososial dalam proses pendidikan.

Dari perspektif teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori konstruksi sosial yang menjelaskan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk realitas sosial melalui proses seleksi isu, penonjolan makna, dan representasi aktor sosial. Proses eksternalisasi terlihat dari upaya aktor kebijakan dalam mengemukakan solusi terhadap persoalan disiplin pelajar, objektivasi muncul melalui pemberitaan media yang menjadikan kebijakan tersebut sebagai realitas publik yang dapat diperdebatkan, sementara internalisasi terjadi ketika masyarakat membentuk opini berdasarkan narasi yang berkembang dalam media. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dikonstruksikan dan didistribusikan dalam ruang komunikasi public.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan karakter yang melibatkan pendekatan disipliner seperti barak militer memerlukan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta komunikasi publik yang transparan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada solusi cepat terhadap kenakalan remaja, tetapi juga mempertimbangkan aspek pedagogis, psikologis, dan perlindungan hak anak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, keluarga, akademisi, serta organisasi perlindungan anak menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip pendidikan modern.

Secara sosial, pemberitaan mengenai kebijakan barak militer juga berdampak pada pembentukan opini publik, munculnya potensi stigma terhadap siswa yang dikategorikan bermasalah, serta berkembangnya diskursus mengenai peran institusi militer dalam ruang pendidikan sipil. Kontroversi yang muncul dalam pemberitaan menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai kebijakan pendidikan yang menyangkut hak anak dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, perdebatan publik yang muncul dapat dipandang sebagai bagian dari proses demokratis dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus mendorong lahirnya pendekatan pendidikan karakter yang lebih inklusif, humanistik, dan berkelanjutan.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi pemberitaan kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi dalam framing Kantor Berita ANTARA, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis framing mampu mengungkap bagaimana media mengonstruksi realitas kebijakan publik melalui penekanan isu, pemilihan narasumber, dan representasi makna tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian konstruksi media dengan mengombinasikan analisis framing dengan pendekatan lain seperti analisis wacana kritis, analisis naratif, atau analisis resepsi audiens. Pendekatan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana pesan media tidak hanya diproduksi, tetapi juga ditafsirkan dan dimaknai oleh masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan pemberitaan dari berbagai media agar terlihat perbedaan konstruksi realitas yang lebih komprehensif.

Kedua, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data ketika memperkenalkan program pendidikan yang bersifat kontroversial. Pemerintah daerah maupun pusat disarankan untuk menyusun kebijakan pendidikan karakter secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, psikolog pendidikan, lembaga perlindungan anak, serta institusi pendidikan. Selain itu, sebelum implementasi kebijakan dilakukan, perlu adanya kajian akademik yang mendalam, kejelasan regulasi, serta standar operasional prosedur yang jelas agar kebijakan tidak menimbulkan polemik sosial maupun potensi pelanggaran hak anak.

Ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya literasi media dalam memahami pemberitaan mengenai kebijakan publik. Masyarakat diharapkan mampu membaca informasi media secara kritis, tidak hanya menerima satu sudut pandang, serta mempertimbangkan berbagai perspektif yang muncul dalam pemberitaan. Selain itu, keluarga dan institusi pendidikan juga diharapkan dapat memperkuat peran mereka dalam pembinaan karakter remaja melalui

pendekatan yang edukatif, dialogis, dan berbasis nilai kemanusiaan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan juga penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan anak dan masa depan generasi muda.

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1. Keterbatasan Sumber Data Media

Penelitian ini hanya menggunakan pemberitaan dari satu media, yaitu Kantor Berita ANTARA, sehingga konstruksi realitas yang dianalisis terbatas pada perspektif media tersebut. Media lain kemungkinan memiliki sudut pandang framing yang berbeda dalam memberitakan kebijakan pendidikan barak militer.

2. Keterbatasan Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing untuk memahami konstruksi pemberitaan media. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana media membingkai suatu isu, namun belum secara mendalam menganalisis proses produksi berita di ruang redaksi maupun interpretasi audiens terhadap pemberitaan tersebut.

3. Keterbatasan Ruang Lingkup Waktu Pemberitaan

Data penelitian diambil dalam periode waktu tertentu ketika isu kebijakan barak militer sedang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika pemberitaan media dalam jangka waktu yang lebih panjang.

4. Keterbatasan Perspektif Aktor Sosial

Penelitian ini menganalisis representasi aktor sosial yang muncul dalam teks berita, namun tidak melibatkan wawancara langsung dengan jurnalis, pembuat kebijakan, maupun masyarakat yang menjadi audiens pemberitaan. Hal ini menyebabkan analisis lebih berfokus pada teks media daripada pengalaman langsung para aktor tersebut.

5. Keterbatasan Konteks Sosial yang Lebih Luas

Penelitian ini berfokus pada konstruksi media terhadap kebijakan pendidikan barak militer, sehingga belum mengkaji secara mendalam dampak nyata kebijakan tersebut terhadap siswa, keluarga, maupun lembaga pendidikan di lapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak sosial dan pendidikan dari implementasi kebijakan tersebut secara lebih empiris.